

## **KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD DALAM PENGEMBANGAN TRANSPORTASI PEDESAAN DIPULAU KABARUAN (Studi dikantor Perhubungan Kabupaten Kepulauan Talaud)**

*Benedictus Zepto Rembaen<sup>1</sup>  
Johny Lumolos<sup>2</sup>  
Neni Kumayas<sup>3</sup>*

### **Abstrak**

Pembangunan Nasional dilaksanakan secara integral dan menyeluruh untuk itu usaha-usaha pembangunan dalam tiap-tiap wilayah harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan potensi dan kondisi wilayah. Keberhasilan pembangunan yang telah dicapai kesegala bidang. Peran sektor transportasi bukan hanya untuk melancarkan arus barang dan mobilitas manusia tetapi juga membantu tercapainya pengalokasian sumber-sumber ekonomi secara baik melalui pembangunan jangka panjang. Peran transportasi dapat memberikan pelayanan yang baik untuk kegiatan manusia, dan cukup tersedia secara baik serta terjangkau oleh daya beli masyarakat yang ada di Pedesaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dalam pengembangan transportasi pedesaan di Pulau Kabaruan (Transportasi Laut). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembangunan pelabuhan dan pengoperasiannya harus dilaksanakan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, dan diawasi oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud juga harus memperhatikan berbagai aspek sosial di lingkungan sekitar yang baik secara langsung atau tidak langsung akan terpengaruh dengan keberadaan pelabuhan nantinya. Sebagai contoh ketersediaan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, fasilitas air bersih yang masyarakat perlukan, serta aktivitas pelabuhan yang menimbulkan udara kotor, dan suara bising. Hal ini merupakan masalah yang kurang diperhatikan dalam pembangunan dan pengoperasian pelabuhan, khususnya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. Pemerintah cenderung memperhatikan aspek internal untuk menunjang pelabuhan tersebut, namun hal itu juga belum dilakukan secara maksimal, sehingga pelabuhan tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu, diperlukan adanya peran pemerintah pusat dalam mengontrol pengeluaran alokasi dana dan pengawasan pembangunan pelabuhan, disertai dengan peran aktif pemerintah daerah dalam pengoperasiannya

**Kata Kunci : Kebijakan, Pemerintah, Pengembangan, Transportasi, Pedesaan.**

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat..

<sup>2</sup> Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

<sup>3</sup> Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

## Pendahuluan

Sistem transportasi di daerah pedesaan yang belum ada perlu dibangun dan dipadukan dengan transportasi perkotaan, melalui pendekatan transportasi pedesaan yang menekankan pada pembangunan jalan desa dan motorisasi kendaraan pedesaan. Karena keunikan transportasi pedesaan, maka pada tahun 1992 dibentuk suatu forum internasional yaitu : “ The International Forum For Road and Development” (IFRD) salah satu kegiatan yaitu inovasi, memperbaiki sarana dan prasarana transportasi pedesaan yang sesuai dengan kemampuan dan teknik pedesaan. Di Provinsi Kabupaten Kepulauan Talaud, sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia terutama memasuki era otonomi daerah diharapkan semakin memacu pada pembangunan daerah. Untuk meningkatkan pembangunan ekonomi membutuhkan jasa angkutan laut atau transportasi laut yang sangat memadai. Angkutan merupakan salah satu sarana yang sangat penting bagi kehidupan perekonomian masyarakat, karena lancar atau tidaknya proses pengangkutan khususnya pengangkutan laut mempengaruhi tingkat aktivitas maupun perkembangan ekonomi masyarakat. Transportasi laut merupakan salah satu subsektor transportasi yang turut menjadi bagian penting dalam menunjang aktivitas masyarakat Kepulauan. Hal ini juga menjadi salah satu sasaran dalam meningkatkan perekonomian nasional dalam menunjang perdagangan antar pulau seperti yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Talaud, khususnya di Pulau Kabaruan. Wilayah pulau Kabaruan menjadikan transportasi laut sebagai salah satu alat bantu yang digunakan untuk menghubungkan satu pulau

dengan pulau lainnya yang terus dikembangkan. Sampai saat ini mengingat bahwa Pulau Kabaruan adalah yang paling jauh dari pusat perdagangan dan Kabupaten. pusat perdagangan yang berada di Pulau Salibabu tepatnya dikecamatan Lirung maka peran dari transportasi laut sangat penting bagi seluruh masyarakat di Pulau Kabaruan agar para masyarakat lebih mudah lagi menjual hasil perkebunan mereka. Uraian permasalahan tersebut merupakan suatu fenomena yang peneliti temukan khususnya dalam Kebijakan Pemerintah kabupaten Kepulauan Talaud Dalam Pengembangan Transportasi Pedesaan Dipulau Kabaruan. Pemerintah harus lebih aktif lagi turun langsung meninjau dilapangan sehingga bisa merasakan apa yang paling menunjang kebutuhan masyarakat khususnya dalam bidang Transportasi Laut.

## Tinjauan Pustaka

### 1. Kebijakan Publik

Anderson dalam Tahir (2014:21) mengklasifikasi kebijakan, policy, menjadi dua: substantif dan prosedural. Kebijakan substantif yaitu apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah sedangkan kebijakan prosedural yaitu siapa dan bagaimana kebijakan tersebut diselenggarakan. Ini berarti, kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Menurut (William Dunn dalam Sahya Anggara 2014:5) menjelaskan bahwa ada empat ciri pokok masalah kebijakan, yaitu sebagai berikut:

1. Saling ketergantungan. Kebijakan bukan merupakan suatu kesatuan yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari seluruh sistem masalah.
2. Subyektifitas. Kondisi eksternal yang menimbulkan suatu permasalahan

didefinisikan, diklarifikasikan, dijelaskan, dan dievaluasi secara selektif.

3. Sifat bantuan. Masalah-masalah kebijakan dipahami, dipertahankan, dan diubah secara sosial.
4. Dinamika masalah kebijakan. Cara pandang orang terhadap masalah pada akhirnya akan menentukan solusi yang ditawarkan untuk memecahkan masalah tersebut.

Empat hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan mengandung berbagai pertimbangan, terlebih jika menyangkut masyarakat banyak. Artinya dapat berhubungan dengan prinsip kemanusiaan, keadilan, kesejahteraan, dan prinsip demokrasi.

## 2. Konsep Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak bisa dilepaskan dari pemahaman pengertian pemerintahan itu sendiri dalam artian yang lebih luas.

Menurut (Hoessein dalam Hanif, 2007:24) Konsep pemerintahan daerah berasal dari terjemahan konsep local government yang pada intinya mengandung tiga pengertian, yaitu: pertama berarti pemerintah lokal, kedua berarti pemerintahan lokal, dan ketiga berarti wilayah lokal. (Tjahja Supriatna dalam Hanif: 2007) yang menyitir pendapat de Guzman dan Taples menjelaskan bahwa unsur-unsur pemerintahan daerah:

- a. Pemerintah daerah adalah subsidi politik dari kedaulatan bangsa dan Negara;
- b. Pemerintah daerah diatur oleh hukum;
- c. Pemerintah daerah mempunyai badan pemerintahan yang dipilih oleh penduduk setempat;
- d. Pemerintahan daerah menyelenggarakan kegiatan berdasarkan peraturan perundangan;
- e. Pemerintah daerah memberikan pelayanan dalam wilayah yurisdiksinya. Dikaitkan dengan fungsi umum pemerintahan maka unsur-unsur pemerintahan daerah di atas masih ditambah dengan Pemerintah daerah melaksanakan pembangunan daerah dan memberdayakan masyarakat daerah dalam wilayah yurisdiksinya.

Asas pemerintahan daerah yang dijadikan dasar untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia pada hakikatnya terdiri dari 3 asas yaitu :

- a. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di daerah.
- c. Tugas pembantuan yaitu penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dan dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Berdasarkan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, maka prinsip-prinsip

penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dapat dirinci sebagai berikut.

1. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah.
2. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.
3. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota sedang otonomi daerah provinsi merupakan otonomi yang terbatas.
4. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjalin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.
5. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom dan karenanya dalam daerah kabupaten dan daerah kota tidak ada lagi wilayah administrasi. Demikian pula di kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh pemerintah atau pihak lain seperti badan otorita, kawasan pelabuhan, kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan perkebunan, kawasan pertambangan, kawasan kehutanan, kawasan perkotaan baru, kawasan pariwisata, dan semacamnya berlaku ketentuan peraturan daerah otonom.
6. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik fungsi legislasi, fungsi pengawasan, maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi dalam kedudukannya sebagai

wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintah tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah.

8. Pelaksanaan asas pembantuan dimungkinkan tidak hanya dari pemerintah kepada daerah, tetapi juga dari pemerintah dan daerah kepada desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskannya.

Berdasarkan pendapat-pendapat yang telah dikemukakan oleh para ahli diatas maka dapat ditarik benang merah bahwa pemerintahan daerah adalah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di daerah otonom, dijalankan oleh semua sumber daya aparatur di dalam pemerintahan daerah tanpa terkecuali. Oleh karena itu, kemampuan sumber daya aparatur daerah yang baik sejatinya akan dapat menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Tanpa kualitas sumber daya manusia yang baik maka mekanisme berjalannya pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik. Pengertian baik yang dimaksud adalah pertama, terjaganya mentalitasnya atau adanya moral yang baik dalam arti jujur, mempunyai rasa tanggung jawab yang besar terhadap pekerjaannya dan dapat bersikap sebagai abdi masyarakat atau public servant. Kedua, memiliki kecakapan atau kemampuan yang tinggi untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

### 3. Pengertian Transportasi

Menurut (Fidel Miro, 2005) Dalam pengertian transportasi diartikan "sebagai usaha pemindahan atau pergerakan dari suatu lokasi ke lokasi yang lainnya dengan menggunakan

suatu alat tertentu”. Dengan demikian maka transportasi memiliki dimensi seperti lokasi asal dan tujuan, alat teknologi dan keperluan tertentu.

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan terutama dalam mendukung kegiatan perekonomian masyarakat tak terkecuali di daerah pedesaan. Sistem transportasi yang ada dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan mobilitas penduduk dan sumber daya lainnya yang dapat mendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi daerah pedesaan. Dengan adanya transportasi harapannya dapat menghilangkan isolasi dan memberi stimulan kearah perkembangan disemua bidang kehidupan baik perdagangan, industri maupun sektor lainnya di daerah pedesaan. Transportasi sangat penting di daerah-daerah pedesaan, di negara-negara yang sedang berkembang, karena menyediakan akses bagi masyarakat desa yang memenuhi kebutuhan dan jasa sehari-hari, serta meningkatkan kehidupan sosial ekonomi. Akses terhadap informasi, pasar dan jasa masyarakat dan lokasi tertentu, serta peluang-peluang baru kesemuanya merupakan kebutuhan yang penting dalam proses pembangunan.

Dengan dibangunnya sarana transportasi, kegiatan ekonomi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam pembangunan pedesaan pada kawasan yang mempunyai potensi ekonomi tinggi akan lebih mudah dikembangkan. Kegiatan ekonomi masyarakat ini akan dikembangkan apabila mempunyai prasarana untuk pemasaran. Pemasaran yang baik dan inovasi teknologi yang bisa diperoleh apabila akses kearah tersebut baik. Kajian transportasi dan

aksesibilitas pedesaan memiliki dimensi persoalan dengan rentang yang luas dan kompleks. Oleh karena itu untuk dapat memahami pola kerja transportasi dan aksesibilitas pedesaan, dituntut untuk memiliki pemahaman cakrawala yang luas, serta cara pandang multidimensi, karena hanya dengan cara itu dapat dilahirkan pengetahuan yang cukup memuaskan untuk menjadi dasar keputusan untuk memecahkan persoalan.

Dalam mencari alternatif solusi pemecahan masalah transportasi dan aksesibilitas pedesaan, satu hal yang perlu dipahami bahwa hal ini bukanlah sektor pembangunan yang berdiri sendiri. Ini berkaitan erat dengan sektor pembangunan lainnya seperti sektor ekonomi, pembangunan dan lainnya. Dengan demikian penyelesaian problem transportasi dan aksesibilitas tidak akan diperoleh jika cara pandang terhadap problem transportasi masih terkotak-kotak dan pendekatannya masih case by case problem solving. Pembinaan sistem transportasi harus dilakukan melalui spektrum yang luas, menyeluruh, terkoordinasi dan tentu saja konsisten. Untuk itu diperlukan koordinasi yang baik dari setiap aktor penentu kebijakan yang langsung dan yang tidak langsung kebijakannya berpengaruh terhadap kinerja sistem transportasi dan aksesibilitas pedesaan.

Kegunaan aksesibilitas berkaitan erat dengan pelaku perjalanan itu sendiri. Karena manusia sebagai pelaku perjalanan tersebut membuat prasarana tersebut untuk mempermudah aktivitas/kegiatan. Manusia dalam melakukan perjalanannya tergantung dari beberapa faktor. Faktor pertama adalah tingkat keberhasilan yang berhubungan dengan kepemilikan kendaraan dan kemampuan untuk membayar. Faktor kedua, kepemilikan

kendaraan, dengan kesempatan untuk melakukan perjalanan lebih banyak dibanding dengan yang tidak memiliki kendaraan. Pada wilayah pedesaan yang jauh dari fasilitas pelayanan, prasarana berupa alat angkut sangat mempengaruhi aktivitas perjalanan disamping sarana yang berupa jalan. Faktor ketiga adalah kepadatan dari pemukiman, apabila kepadatan suatu daerah rendah maka penggunaan kendaraan umumnya rendah pula meskipun hal tersebut tidak berlaku mutlak. Faktor keempat yang mempengaruhi orang melakukan perjalanan adalah faktor sosial ekonomi berupa besarnya keluarga, struktur jenis kelamin, usia, anggota keluarga, proporsi angkatan kerja dan jenis pekerjaan. Banyak sekali keuntungan yang dapat diperoleh dari pembangunan akses pada daerah pedesaan yang dapat dirasakan. Fungsi transportasi sebagai promotor perubahan bukan sebagai inisiator perubahan. Hal ini berarti kelancaran transportasi akan mengundang sektor-sektor lain untuk berkembang terutama sector pertanian dan sosial ekonomi lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan daerah perekonomian daerah pedesaan.

Dalam memacu perekonomian suatu daerah atau wilayah disamping potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia sangat diperlukan pola keberadaan sarana dan prasarana yang mampu menggerakkan roda perekonomian. Prasarana dan sarana yang tidak memadai sangat sulit untuk mengembangkan daerah yang bersangkutan karena peran serta yang dimiliki oleh sarana dan prasarana maka perlu aktivitas ekonomi yang terjadi pada suatu daerah dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang. Pada prinsipnya sarana dan prasarana harus

dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan yang dialami oleh daerah atau wilayah tersebut.

## Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah jenis penelitian Kualitatif yaitu bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud Dalam Pengembangan Transportasi Pedesaan Di Pulau Kabaruan. Dalam penelitian ini penentuan informan dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling metode purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang didasarkan dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Penelitian kualitatif tidak bermaksud untuk membuat generalisasi dari hasil penelitian yang telah tercermin dalam fokus penelitian ditemukan secara sengaja atau purposive sampling. Sehingga peneliti mengambil informan dalam penelitian ini adalah Kabid Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Talaud, Camat Damau, Camat Kabaruan dan Tokoh Masyarakat di Kecamatan Damau.

## Hasil Penelitian

### 1. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud

Formulasi kebijakan sistem transportasi laut di Pulau Kabaruan merupakan bagian dalam proses kebijakan publik dan tahap ini adalah yang paling krusial, karena implementasi dan evaluasi kebijakan sebagai tahap selanjutnya hanya dapat dilaksanakan dengan efektif apabila tahap formulasi kebijakan telah selesai dengan baik. Di samping itu, kegagalan suatu kebijakan atau program sistem

transportasi laut di Pulau Kabaruan dalam mencapai tujuan-tujuannya, sebagian besar bersumber pada ketidaksempurnaan atau ketidak efektifan pengelolaan tahap formulasi. Policy formulation sama dengan pembentukan kebijakan, yaitu kebijakan sistem transportasi laut di Pulau Kabaraun yang merupakan serangkaian tindakan pemilihan berbagai alternatif yang dilakukan dan di dalamnya termasuk pembuatan keputusan. Penjelasan tersebut diperkuat bahwa efektivitas proses pembuatan/ formulasi kebijakan negara (publik) dibidang transportasi laut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud (dinas perhubungan) mengatakan bahwa proses kebijakan tersebut sementara dilaksanak. Kebijakan-Kebijakan Pemerintah tersebut antara lain:

1. Pembangunan Pelabuhan Tamban Perahu yang berlokasi di kecamatan kabaruan (sementara proses pembanguna di pelabuhan Mangaran)
2. Pemindahan lokasi Pelabuhan Fery (sementara mencari lokasi yang tepat)
2. Perkembangan Keadaan dalam Pembangunan

Terkait bahasan tentang ini, informan menjelaskan bahwa kemajuan transportasi akan membawa peningkatan dan perkembangan pembangunan, misalnya mobilitas manusia, mobilitas faktor-faktor produksi dan mobilitas hasil olahan yang dipasarkan. Makin tinggi mobilitas yang dilakukan, semakin cepat gerakan distribusi serta lebih singkat waktu yang diperlukan dalam mengolah bahan dan memindahkannya dari tempat dimana bahan tersebut yang semula kurang bermanfaat ke lokasi yang manfaatnya lebih besar. Peningkatan produktivitas, karena transportasi ini merupakan

motor utama penggerak kemajuan ekonomi yang mampu mengembangkan keadaan dalam pembangunan.

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa ekonomi yang berkembang akan ditunjukkan oleh adanya mobilitas yang tinggi, dengan ditunjang transportasi yang memadai dan lancar. Seperti halnya pembangunan Tamban Perahu juga pemindahan Pelabuha Fery dapat mempercepat suatu proses pemindahan baik manusia juga barang hasil dari pertanian masyarakat. juga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat karna didukung dengan pembangunan yang mempermudah suatu akses dalam bidang Transportasi Laut khususnya di Pulau Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud.

Transportasi berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan produsen dengan konsumen. Transportasi dan perkembangan wilayah memiliki dimensi persoalan dengan rentang yang luas dan kompleks. Oleh karena itu untuk dapat memahami pola kerja transportasi dan aksesibilitas, dituntut untuk memiliki pandangan yang luas tidak hanya pada satu bidang kajian ilmu saja. Transportasi dan perkembangan wilayah merupakan hal yang sangat erat hubungannya, dikarenakan dalam pengembangan wilayah haruslah memiliki transportasi yang mendukung. Hasil triangulasi menunjukkan bahwa transportasi juga dapat memajukan kesejahteraan ekonomi masyarakat, menciptakan dan meningkatkan tingkat aksesibilitas dari potensi-potensi sumber alam dan luas pasar. Sumber alam yang semula tidak termanfaatkan akan terjangkau dan dapat diolah. Prasarana transportasi berperan sebagai alat bantu untuk mengarahkan pembangunan dan sebagai prasarana bagi pergerakan manusia dan atau

barang akibat adanya kegiatan ekonomi di daerah tersebut. Sebagai contoh suatu kawasan permukiman baru yang hendak dipasarkan, tidak akan pernah ada peminatnya apabila di lokasi tersebut tidak disediakan prasarana transportasi. makin tinggi mobilitas yang dilakukan, semakin cepat gerakan distribusi serta lebih singkat waktu yang diperlukan dalam mengolah bahan dan memindahkannya dari tempat bahan tersebut yang semula kurang bermanfaat ke lokasi yang manfaatnya lebih besar.

Peningkatan produktivitas, karena transportasi ini merupakan motor utama penggerak kemajuan ekonomi. Ekonomi yang berkembang akan ditunjukkan oleh adanya mobilitas yang tinggi, dengan ditunjang transportasi yang memadai dan lancar. Seperti halnya Negara-negara maju, mereka memiliki transportasi yang mendukung dalam setiap aktivitas yang mereka lakukan. Dengan transportasi yang baik, akan memudahkan terjadinya interaksi antara penduduk lokal dengan dunia luar. Keterisolasian merupakan masalah pertama yang harus ditangani. Transportasi berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan produsen dengan konsumen.

Dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat, diperlukan penyelenggaraan penataan ruang yang efektif dan partisipatif sebagai arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau dunia usaha agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Pelabuhan mempunyai peran penting dan strategis dalam menunjang kelancaran arus lalu lintas kapal/perahu motor, penumpang dan/atau barang serta sebagai tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda dalam mendorong

pertumbuhan perekonomian daerah. Dengan demikian, Pemerintah daerah sendiri tidak hanya sebagai pelaksana dalam pembangunan dan pengoperasian pelabuhan, tetapi berkewenangan untuk mengelola pelabuhan tersebut. Sesuai dengan tujuan otonomi daerah, yakni mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah.

Hal itu diwujudkan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, serta prinsip dalam otonomi/desentralisasi. Karena itu tidak adil apabila pemerintah daerah tidak diberdayakan dengan adanya kewenangan pengelola pelabuhan.

### 3. Pembangunan Infrastruktur dan Pengoperasian Pelabuhan Guna Mempercepat Ekonomi Masyarakat.

Pembangunan daerah perbatasan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Pengelolaan daerah perbatasan menghendaki adanya perhatian yang lebih fokus agar terjadi peningkatan kualitas pembangunan dan kualitas penduduk di wilayah tersebut. Secara garis besar, permasalahan pembangunan daerah perbatasan mencakup permasalahan kondisi geografis dan topografi wilayah permasalahan yang berdimensi lokal berupa kemiskinan permasalahan yang berdimensi nasional berupa kegiatan ekonomi ilegal dan permasalahan yang berdimensi regional seperti kesenjangan sosial antara penduduk negeri sendiri dengan penduduk negara tetangga, serta pergeseran garis tapal batas dan permasalahan berdimensi ekonomi, yaitu belum berkembangnya komoditas unggulan yang sinergis dengan industri pengolahan.

Pulau Kabaruan memang mempunyai dua pelabuhan kapal tetapi

hanya satu yang bisa digunakan yaitu pelabuhan kapal Pelni atau Perintis yang lokasinya di Pasir Putih yang tempatnya di desa Idaman Kecamatan Kabaruan. Sedangkan pelabuhan kapal Fery yang lokasinya di desa Mangaran pernah juga digunakan tetapi hanya beberapa kali kapal Fery berlabuh di pelabuhan tersebut, mengingat lokasinya yang tidak memadai untuk kapal berlabuh. Dikatakan tidak memadai karena pada saat air laut surut lokasi tempat berlabuhnya kapal menjadi sangat dangkal di pelabuhan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah mengambil kebijakan untuk memindahkan lokasi pelabuhan Fery ke tempat yang lebih strategis.

Pelabuhan kapal Pelni atau Perintis yang biasa digunakan masyarakat adalah rute kapal Tahuna dan Bitung. Selain digunakan untuk bepergian, masyarakat memanfaatkan akses kapal Pelni atau Perintis ini untuk transaksi jual beli kopra yang akan di bawah Bitung. Pada dasarnya pelabuhan kapal dapat membantu mempermudah proses pemindahan atau pengangkutan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain, apalagi bagi masyarakat Pulau Kabaruan yang sebagian besarnya adalah petani kopra.

Sedangkan jika di lihat dari segi potensi unggulan masyarakat di Pulau Kabaruan sendiri, pembangunan infrastruktur dan pengoperasian pelabuhan sendiri menjadi salah satu instrumen sarana paling penting dalam mempercepat ekonomi masyarakat setempat, sehingga potensi - potensi unggulan yang ada di Pulau Kabaruan bisa di kembangkan guna mempercepat kebutuhan ekonomi masyarakat setempat.

Adapun potensi-potensi unggulan yang ada di Pulau Kabaruan sebagai berikut: Pertanian, Perkebunan,

Kehutanan, Peternaka, Industri Kerajinan Rumah Tangga, Obyek Wisata, Potensi Perikanan. Tentang pembangunan infrastruktur dan pengoperasian pelabuhan peneliti mewawancarai Kabid Dinas Perhubungan, beliau mengatakan: "Tujuan pembangunan infrastruktur di Pulau Kabaruan sendiri bertujuan untuk meningkatkan ekonomi potensial, misalnya, potensi hasil tani, serta potensi penghasilan laut dari nelayan".

Pentingnya transportasi diarahkan untuk menjembatani kesenjangan antara wilayah dan mendorong pemerataan hasil pembangunan. Transportasi laut memegang peranan penting dalam kelancaran perdagangan karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi antara lain daya angkut banyak dan biaya relatif murah. Guna menunjang perdagangan dan lalu lintas muatan, pelabuhan diciptakan sebagai titik simpul perpindahan muatan barang dimana kapal dapat berlabuh, bersandar, melakukan bongkar muat barang dan penerusan ke daerah lainnya.

Pelabuhan merupakan sarana yang penting terutama bagi transportasi laut, dengan adanya transportasi ini, jarak tempuh yang dibutuhkan akan terasa lebih cepat, terutama bagi perkembangan ekonomi suatu daerah dimana pusat produksi barang konsumen dapat dipasarkan dengan cepat dan lancar. Selain itu pada bidang ekonomi, pelabuhan membawa dampak positif bagi perkembangan suatu daerah yang terisolir terutama daerah perairan dimana aksesibilitas melalui darat sulit dilakukan dengan baik.

Pembangunan infrastruktur suatu wilayah dapat memberikan pengaruh pada peningkatan akses masyarakat terhadap sumber daya sehingga meningkatkan akses

produktivitas sumber daya yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur atau sarana dan prasarana memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan kesejahteraan social dan kualitas lingkungan juga terhadap proses pertumbuhan ekonomi suatu wilayah atau region.

Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan indikasi bahwa wilayah yang memiliki kelengkapan sistem infrastruktur lebih baik biasanya mempunyai tingkat kesejahteraan sosial dan kualitas lingkungan serta pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pula. Pembangunan infrastruktur pelabuhan membutuhkan biaya yang besar, keberhasilan ataupun kegagalan dari proyek tersebut akan memiliki implikasi jangka panjang terhadap daerah yang bersangkutan Keberadaan sebuah pelabuhan memberikan dampak yang sangat signifikan pada pembangunan ekonomi di sekitar wilayah pelabuhan, sehingga keberhasilan pelabuhan tidak hanya memberikan dampak pada keuntungan bagi para investor tetapi juga pada pemerintah daerah dan masyarakat sekitar melalui eksternalitas yang menyebar pada perekonomian kawasan tersebut.

#### 4. Pelabuhan Sebagai Sarana Integrasi Pulau-Pulau Di Daerah Perbatasan.

Revolusi Maritim pada masa Pemerintahan saat ini dimulai dengan visi besar membangun “Tol Laut” yang menghubungkan pelabuhan Indonesia bagian barat dengan bagian timur, dari Belawan hingga ke Sorong. Maka saat ini fokus pemerintah adalah membangun infrastruktur pelabuhan dan juga potensi maritim lainnya dengan salah satu tujuan utamanya adalah guna meningkatkan integrasi aliran barang (logistik) nasional.

Dengan tercapainya integrasi logistik nasional diharapkan bahwa seluruh aktivitas logistik di Indonesia mulai dari tingkat pedesaan, perkotaan sampai dengan antar wilayah dan antar pulau beroperasi secara efektif dan efisien serta menjadi satu kesatuan yang terintegrasi secara nasional dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang akan membawa kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat Indonesia. Salah satu unsur penting untuk mencapai hal tersebut adalah dengan adanya pelabuhan sebagai penyedia sarana dan prasarana kegiatan bongkar muat barang.

#### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari penulisan skripsi ini, maka dapat disimpulkan bahwa Pelabuhan yang merupakan pintu masuk perdagangan internasional seharusnya mampu menyediakan fasilitas yang menunjang dalam pelaksanaannya, hal tersebut tidak serta merta dapat dilakukan langsung, namun hal ini harus direncanakan sebelumnya oleh Pemerintah Pusat sebelum di laksanakan pembangunan pelabuhan dan pengoperasiannya oleh Pemerintah Daerah.

Pembangunan pelabuhan dan pengoperasiannya harus dilaksanakan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, dan diawasi oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud juga harus memperhatikan berbagai aspek sosial di lingkungan sekitar yang baik secara langsung atau tidak langsung akan terpengaruh dengan keberadaan pelabuhan nantinya. Sebagai contoh ketersediaan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, fasilitas air bersih yang masyarakat perlukan, serta aktivitas

pelabuhan yang menimbulkan udara kotor, dan suara bising.

Hal ini merupakan masalah yang kurang diperhatikan dalam pembangunan dan pengoperasian pelabuhan di Indonesia, khususnya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. Pemerintah cenderung memperhatikan aspek internal untuk menunjang pelabuhan tersebut, namun hal itu juga belum dilakukan secara maksimal, sehingga pelabuhan tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu, diperlukan adanya peran pemerintah pusat dalam mengontrol pengeluaran alokasi dana dan pengawasan pembangunan pelabuhan, disertai dengan peran aktif pemerintah daerah dalam pengoperasiannya.

## Saran

- Pemerintah daerah harus berinovasi dalam memperoleh dana dari pihak swasta agar pembangunan infrastruktur cepat terlaksanakan.
- Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus lebih ditingkatkan dalam membangun konektivitas, sehingga perlu disamakan visi dengan mengedepankan peran BAPPENAS.
- Perlu adanya keberanian pemerintah untuk merelokasikan belanja infrastruktur yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.
- Menyelesaikan permasalahan yang timbul di sekitar pelabuhan ini, sehingga tidak hanya aktivitas pelabuhan yang dapat berjalan dengan baik, tapi juga dapat memberikan pengaruh yang positif bagi masyarakat sekitar

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Jogjakarta: Graha Ilmu.
- Fidel Miro, 2005. *Perencanaan Transportasi*. Jakarta: Gelora Aksara Pratama.
- Haryono Sukarto, 2006. *Transportasi Perkotaan dan Lingkungan* Jakarta: Jurnal Teknik.
- Ikbar, Yanuar. 2012. *Metode penelitian sosial kualitatif*. Bandung: Rafika Aditama.
- Nasution, Zulkarimen. 2007. *Komunikasi Pembangunan (Pengenalan Teori dan Penerapannya)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Puspitasari, Nopa. 2013. *Strategi pengembangan pelabuhan perikanan nusantara karangantu kota serang provinsi banten (Development Strategy of Karangantu Archipelago Fishing Port (AFP), Serang City, Banten Province*. *Jurnal Ilmu Pertanian dan Perikanan Desember 2013 Vol. 2*.
- Sahya, Anggara. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Suharno. 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Suharto. 2006. *Membangun Masyarakat dan memberdayakan masyarakat*. Bandung: Cet I Refika Admitama.
- Tahir. Arifin. 2014. *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta,
- Winarno. Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: Media Pressindo